

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Durkheim, Emile. Sosiologi dan Filsafat. Diterjemahkan oleh Soedjono Dirdjosiswono. Jakarta: Erlangga, 1989.q
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. Pertambangan dan Lingkungan: Problematika Hukum dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Poloma, Margaret. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Putro, Widodo Dwi. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rosadi, Oton. Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2010.
- Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2009.

Artikel Jurnal

- Astuti, Budi, dan M. Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 219.

- Hardiyanti, Marzellina, dan Sugiyanto. "Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat pada Sistem Negara Hukum Prismatik." *Progressive Law and Society (PLS)* 1, no. 1 (2023): 44.
- Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat." *Hukum dan Masyarakat* 10, no. 2 (Desember 2014): 165
- Imadhani, Intan, dan Budi Santoso. "Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan." *Notarius* 17, no. 3 (2024): 1943.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019): 14.
- Manik, Olivia Sabrina Br. "Kebijakan Perizinan Berusaha di Indonesia dan Kepastian Hukum bagi Investor Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja." *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 2023): 855.
- Murphy, Colleen. "*Lon Fuller and the Moral Value of the Rule of Law.*" *Law and Philosophy* 24 (2005): 241.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 255.
- Pinilih, Ekar Anggun Gading. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 1 (Februari 2018): 200.
- Poli, Preisi Regina, Lendy Siar, and Toar Neman Palilingan. "Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigrasi di Indonesia." *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 3 (2025): 3.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 194.
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (Agustus 2010): 116.

- Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 8, no. 2 (Oktober 2024): 324.
- Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2024).
- Suparji. Penanaman Modal Asing di Indonesia: Insentif v. Pembatasan. Jakarta: FH Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008.
- Susetyo, Heru, Satrio Febriyanto, Tien Tis'aini Latifah, Deden Ardiansyah, dan Feymi Angelina. "Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung." Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 25, no. 2 (2024):2.
- Winata, Agung Sujati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 127.

Tesis/Disertasi

- Aryani, Dwi, dan Nurhasan Ismail. *Tumpang Tindih Perijinan Pertambangan dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum Berinvestasi*. Tesis S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Nasir, Abdul Haris, dan Sudjito. *Jual Beli Hak atas Tanah Bekas Lahan Transmigrasi di Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis S2 Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2013.

Kamus

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanpa tahun.

Internet

- Designing Buildings Wiki. "Land Acquisition." Terakhir disunting 22 Oktober 2020. https://designingbuildings.co.uk/wiki/Land_acquisition. (diakses 03 November 2025).
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. "Penyelesaian Masalah Lahan Transmigrasi Harus Didukung Data & Informasi Akurat." Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/penyelesaian-masalah-lahan-transmigrasi-harus-didukung-data-informasi-akurat/>. (diakses 12 September 2025).

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. "Menjembatani Pemahaman Praktek Pertambangan: Tahapan dan Resiko Penambangan." Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 13 Oktober 2012.
<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-menjembatani-pemahaman-praktek-pertambangan-tahapan-dan-resiko-penambangan-5#:~:text=Pada%20dasarnya%20pertambangan%20merupakan%20rangkai%20dikerjakan%20mengandung%20potensi%20yang%20menjanjikan.> (diakses 12 September 2025).

Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Transmigrasi. "Trans Tuntas Jadi Solusi Kementerian Transmigrasi Bereskan Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi dan Kawasan Hutan." Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. 25 November 2022.
<https://www.transmigrasi.go.id/ditjenpemt/trans-tuntas-jadi-solusi-kementerian-transmigrasi-bereskan-tumpang-tindih-lahan-transmigrasi-dan-kawasan-hutan/>. (diakses 12 September 2025).

Greenpeace Indonesia. "Surga yang Hilang?: Sebuah Laporan Bagaimana Pertambangan Nikel Mengancam Masa Depan Salah Satu Kawasan Konservasi Paling Penting di Dunia", <http://greenpeace.org/indonesia/laporan/63114/surga-yang-hilang/>. (diakses 7 September 2025).

Hukumonline. "Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa." Hukumonline.com. 4 Januari 2023. <https://rcs.hukumonline.com/insights/perkembangan-regulasi-pertambangan>. (diakses 10 September 2025).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Pemilik Cadangan Nikel dan Bauksit Terbesar di Dunia, Ini yang Dilakukan Indonesia." Siaran pers, 3 November 2024. <https://esdm.go.id/>. (diakses 7 September 2025).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang: Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan." <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3289/peta-indikatif-tumpang%20tindih-pemanfaatan-ruang-ketidaksesuaian-perizinan-pertambangan-dalam-kawasan-hutan>. (diakses 7 September 2025).

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. "HASIL TRANSMIGRASI SEJAK DESEMBER 1950 SAMPAI SEKARANG." Kementerian

Transmigrasi Republik Indonesia. n.d. <https://www.transmigrasi.go.id/>.
(diakses 12 September 2025).

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. "Kementrans Siapkan Lahan Komunal untuk Investasi Peternakan Sapi dari Brazil." Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. 16 Mei 2025. <https://www.transmigrasi.go.id/kementerian-investasi/#:~:text=Konsep%20baru%20transmigrasi%20saat%20ini,berbasis%20agribisnis%20di%20kawasan%20transmigrasi>. (diakses 12 September 2025).

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. "Program dan Kebijakan." Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. <https://www.transmigrasi.go.id/program-dan-kebijakan/#:~:text=Pemerataan%20Pembangunan:%20Transmigrasi%20bertujuan%20untuk,mengurangi%20ketimpangan%20pembangunan%20antar%20wilayah>. (diakses 12 September 2025).

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. "Tentang Kementrans." Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. <https://www.transmigrasi.go.id/>. (diakses 12 September 2025).

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. "Alur Proses Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi." Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. <https://www.transmigrasi.go.id/layanan/alur-proses-pembangunan-dan-pengembangan-kawasan-transmigrasi/>. (diakses 26 Januari 2026).

Khuluq, M. Khusnul. "Di Antara Dua Kutub: Kepastian Hukum dan Keadilan Hidup." *Marineews Mahkamah Agung*. <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/di-antara-dua-kutub-kepastian-hukum-dan-keadilan-hidup-0nA#:~:text=Kepastian%20hukum%20memberi%20rasa%20aman,ubah%20sesuai%20dengan%20kehendak%20kekuasaan>. (diakses 12 September 2025).

Kompas.com. "Ratusan Transmigran di Morowali Telantar." 7 September 2012. <https://medan.kompas.com/read/2012/09/07/05403397/ratusan-transmigran-di-morowali-telantar>. (diakses 4 November 2025).

Kompas.com, Kronologi Larangan Ekspor Biji Nikel yang Berujung Gugatan Uni Eropa, <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-biji-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa>. (diakses 22 November 2025).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Potensi Konflik Agraria yang Terus Berlanjut di Indonesia, 27 Februari 2025, <https://kpa.or.id/2025/02/27/potensi-konflik-agraria-yang-terus-berlanjut-di-indonesia/>. (diakses 14 Juni 2025).

Muliawati, Firda Dwi. "Sektor Tambang RI Setor Rp 140,5 Triliun ke Pendapatan Negara." CNBC Indonesia, 7 Agustus 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250807145013-4-656053/sektor-tambang-ri-setor-rp-1405-triliun-ke-pendapatan-negara>. (diakses 7 September 2025).

Tanah Kita. *Dashboard Sebaran Konflik & Wilayah Kelola*. https://tanahkita.id/dashboard_portal. (diakses 14 Juni 2025).

Tim Minerco Media. "Kenali Hukum dan Regulasi Dalam Sektor Pertambangan." Minercomedia. 12 November 2024. <https://minermcomedia.com/2024/11/12/kenali-hukum-dan-regulasi-dalam-sektor-pertambangan/>. (diakses 12 September 2025).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Dampak Pertambangan Nikel Terhadap Pulau Wawonii". <https://www.walhi.or.id/dampak-pertambangan-nikel-terhadap-pulau-wawonii>. (diakses 7 September 2025).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Hilirisasi Mineral Berujung pada Kerugian dan Kriminalisasi Warga di Morowali", <https://www.walhi.or.id/hilirisasi-mineral-berujung-pada-kerugian-dan-kriminalisasi-warga-di-morowali>. (diakses 7 September 2025).

Wicaksono, Raden Ariyo. "KPA: Konflik Agraria Naik 21%." Betahita, 23 Januari 2025. <https://betahita.id/news/detail/10870/kpa-konflik-agraria-naik-21-.html?v=1737597573>. (diakses 14 Juni 2025).

Wisnubrotom, Kristantyo. "Hilirisasi Pacu Lompatan Pertumbuhan Sektor ESDM." Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8706/hilirisasi-pacu-lompatan-pertumbuhan-sektor-esdm?lang=1>. (diakses 7 September 2025).

World Trade Organization. "Dispute Settlement: Indonesia – Measures Relating to Raw Materials." No. DS592. (diakses 22 November 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Strategis.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).